

HARIAN analisa

Penerbit : PT Media Warta Kencana
 Pemimpin Umum : Supandi Kusuma
 Pemimpin Perusahaan : Sujito Sukirman
 Pemimpin Redaksi/ Wakil Pemimpin Redaksi/ Managing Editor/ Redaktur : H. Sofyan War Djamil Paulus M. Tjokrono H. Agus Salmi, Anthony Limtan, H. Hermansyah, SR. Hamonangan Panggabean, Idris Pasambo, Hendar Tustin, Kwo Tjen Siong, Sauma, H. Aji Murtasalo, Sugiatno, Guntur Adi Sukma, Tingkh Kamarozaman, Rizal Rudi Surya, Taufik Wai Hidayat, Zulmaidi, Muhammad Arifin, Zuhaidi, J. Arto.
 Anggota Redaksi : Faisal Pardede, Iham Nasution, Ridwan, Fahrin Malau, M. Abdur, Ramadan Zukri Sagala, Rhinto Sutanto, Annu Lubis, M. Aki Akbar, M. Iqbal Nasution, Hendra Irawan, Mahjidi Chair, Suhayri Ramadani, M. Syahril Mukmin, Dina Nursety, Iham Ridwan, Jablong Sitanggang, Bardansyah, Bambang Riyanto, Dedy Gunawan Hutaulu, Isnaini Kharisma, Niwansyah Sakartana, Syaifirri Tambunan, Yogi Yuwosia, Adelina Savitri Lubis, Eko Satra Handoko, Indah Pratiwi, Sari Ramadhani, Iren Juwita, Nur Akmal, Ahmad Nugraha Putra, Rudi Saputra.
 Redaksi : Feryd Siregar, M. Saif Harahap, Jumiadi Gandy, Khaifal Umri Butahara, Qodrat Al-Qadri.
 Fotografer : Semingga 7 kali Rp. 13.000,- per mm/dokom (numm) Rp. 10.000,- per mm/dokom (kabar dukacita)
 T e r b i t : JI. Jend. A. Yani No. 35-49 Medan 20111
 A l a m a t : Kotak Pos : 1481, Telex No. 51326 Redaksi : (061) 4156653 (5 saluran) Fax. (061) 4534116.
 T e l e p o n : Tata Usaha : (061) 4154711 (5 saluran), 4513554, 4524136, 4534279. Fax. (061) 4151436. Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 43-A, Jakarta Pusat, Tel. (021) 6322440, 6322271, 6322289 Fax. (021) 6322315
 S I U P P : SK. Mengenai No. 02/SK/MENPENS/UPPIA/31/985 tanggal 24 Desember 1985
 Perwakilan Jakarta : PT. SURYA MAS ABADEI MAKMUR Jl. Pulau Solor KIM II Mahab - Deliserdang
 Diketacit Oleh :



Radikalisme dalam Bingkai Harmonisme

Oleh: Riza Multazam Luthfy

TIDAK hanya menjadi fokus perhatian pemerintah, radikalisme yang mencuat akhir-akhir ini juga menjadi sorotan dunia internasional. Bagaimana pun, radikalisme mengancam eksistensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahaya radikalisme dapat meluluhlantakkan cita-cita luhur dan mulia yang genap dijabat oleh para bapak bangsa (*founding fathers*). Bahkan, jika dibiarkan, menguatnya gejala radikalisme dapat menyuburkan beragam teror bercorak kekerasan yang senantiasa menyebarkan aroma kecemasan, ketakutan, serta rasa trauma bagi masyarakat sipil.

Terorisme
Munculnya kasus-kasus terorisisme di Tanah Air tidak terlepas dari keberadaan golongan-golongan Islam berpaham radikal. Pandangan sempit mengenai agama dipraktikkan oleh golongan ini dengan melabeli orang lain "kafiri" atau "sesat", dalam tingkat yang lebih ekstrim, mereka menghalalkan harta dan darah siapa saja yang mempunyai kepercayaan berbeda. Akhirnya, berbalik menghiasi kaum muslim, teretuslah ide bom bunuh diri di lokasi-lokasi berkumpulnya umat Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, serta Konghucu.

Jika ditelisik secara seksama, terdapat pengaruh negatif bertunasnya radikalisme terhadap raphunya fondasi kebangsaan. Rendahnya toleransi beragama turut disulut oleh paham radikal yang disebarkan oleh beberapa kalangan. Mereka mempraktikkan cara beragama yang homogen sekaligus mengingkari realitas masyarakat multikultural. Hal ini diperparah dengan ideologi mereka yang menihilkan prinsip kesetaraan dan kesederajatan semua manusia di hadapan Sang Pencipta. Imbasnya, muncul beragam perilaku diskriminatif serta tindak kekerasan atas nama agama.

Apapun yang terjadi belakangan ini menggambarkan bahwa nilai, prinsip, serta etos kebangsaan telah dikikis radikalisme yang berkembang menjadi terorisme. Miskinnya pengetahuan tentang konsep Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi alam semesta) menjadikan generasi mudatergoda untuk bergabung dalam kelompok radikal.

Di samping melahirkan disharmoni sosial, fenomena ini juga rentan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal, radikalisme dan terorisme tak mungkin mendapat tempat ketika nilai kebinekaan dipegang teguh oleh semua pihak.

Prototipe
Terorisme sebenarnya merupakan isu bersama yang layak diperolehi perhatian utama. Oleh karena itu, upaya deradikalisasi semestinya bukan sekedar dilakukan dengan mendukung Undang-Undang Antiterorisme, melainkan juga dengan mewujudkan keberagaman inklusif. Betapa eksklusivitas dan fanatisme yang berlebihan rentan melahirkan kecurigaan terhadap pemeluk agama lain.

Dalam konteks inilah, harmonisme desa sebagai semacam "prototipe" kerukunan antarumat beragama menemukan relevansinya. Betapa kearifan dan

kebijakan yang genap diwariskan oleh para pendahulu atau nenek moyang mampu mencegah mewabahnya radikalisme. Apalagi, sejak dahulu kala, inspirasi mengenai tingginya penghormatan terhadap sesama ditunjukkan oleh orang desa.

Di Jawa, terdapat banyak contoh mengenai harapan akan keharmonisan di level desa. Terjalinnnya hubungan yang harmonis di antara pemeluk-pemeluk keyakinan yang berbeda dijumpai pada desa Sempu, Bantul, di mana masyarakatnya masih memegang teguh mitos Sabda Palon.

Di desa yang terletak di selatan Yogyakarta inilah, publik dapat secara luas menyaksikan suatu kompleks pemakaman China yang terawat cukup baik, sebuah vihara Buddhis, sebuah masjid, sebuah gereja Katolik, serta sebatang pohon yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Di tengah pluralitas iman tersebut, semangat toleransi serta keharmonisan antarwarga tetap terpelihara. (M.C. Ricklefs, 2013: 719).

Masyarakat Kelurahan Jamika, Bandung, Jawa Barat, juga senantiasa menjaga kerukunan lintas kepercayaan. Walaupun terdiri atas beraneka etnik dan agama, tetapi penduduknya sanggup hidup berdampingan. Di wilayah yang mengantongi predikat Kampung Toleran itu terdapat enam gereja, empat vihara, serta dua masjid. Lantaran enggan mempermasalahkan warna kulit dan agama, warga acap menggelar kegiatan yang melibatkan semua elemen masyarakat. Salah satunya kegiatan ronda yang wajib diikuti oleh setiap orang.

Suana gubuh dan damai cukup menonjol saat hari besar salah satu agama dirayakan. Selain memberi kebebasan bagi siapa saja yang ingin memanfaatkan rumah ibadah, warga yang berbeda agama juga terlibat dalam membantu kelancaranraya.

Dalam taratan teoritis, pemerintah harus gencar menyelipkan pemahaman tentang multikulturalisme. Dengan mengadopsi konsep harmonisme desa, setiap warga negara dibimbing untuk senantiasa memelihara kebersamaan. Semua orang dituntut memiliki rasa kepedulian terhadap sesama.

Bagaimanapun, perbedaan kepercayaan tidak lantas menghalangi setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Mengingat bahwa dalam suatu masyarakat pluralis, terbentuknya kehidupan humanis yang senantiasa dilandasi dengan kentalnya ikatan persaudaraan merupakan keniscayaan.

Dalam taratan praktis, pemerintah dapat mendirikan Kampung Damai, terutama di daerah-daerah yang rawan dengan aksi teror. Semua elemen masyarakat diajak untuk selalu menghadang dan menangkal kekerasan isu agama. Kapasitas orang-orang yang bermukim di Kampung Damai juga diperiapkan menjadi aktor perdamatan pemeluk agama lain.

Dalam konteks inilah, harmonisme desa sebagai semacam "prototipe" kerukunan antarumat beragama menemukan relevansinya. Betapa kearifan dan

Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UIH Yogyakarta.

Tajuk Rencana

SAMPAI pekan ketiga November ini, tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, sudah berjalan lebih dari dua bulan sejak dimulai pada 23 September lalu. Namun, kampanye itu, khususnya kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres), dinilai belum menunjukkan kualitas yang baik. Materi dan narasi kampanye yang disampaikan dua pasangan calon presiden/wakil presiden belum menyentuh inti kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara untuk menuju kemajuan yang harus dicapai.

Para ahli dan pengamat, pekan lalu, berpendapat, kampanye pilpres masih miskin gagasan dan isu substantif. Materi dan narasi yang dibangun lebih banyak berupa jargon dan kampanye negatif—meski kampanye jenis ini memang tidak dilarang. Direktur Eksekutif Voxpoll Center Research and Consulting, Pang Syamsi Chaniago, menyatakan, situasi ini mengganggu kualitas demokrasi akibat "dagelan" politik muraah tak bermutu. Demikian juga pendapat ahli psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, yang menyebutkan, tidak ada kebijakan atau program alternatif yang ditawarkan kedua pasangan capres untuk lima tahun ke depan. Karena miskin ide itu, yang terjadi justru kampanye bersifat menyerang karakter personal calon.

Pun demikian diturunkan pesan-pesan politik JIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heyanto. Menurutnya, perang diksi antar kandidat belum tentu efektif menggaet dukungan publik. Mayoritas publik tidak peduli terhadap kampanye perang diksi itu. Masyarakat, khususnya massa yang membangun, justru menanti perkembangan lebih lanjut akan gagasan dan materi kampanye kedua pasangan calon pemimpin bangsa ini.

Dalam 2,5 bulan terakhir, harmonisasi bangsa ini memperingati beberapa momen sejarah yang menjadi tonggak perjuangan bangsa. Misalnya, Hari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Hari Pahlawan. Nyatanya, berbagai momentum itu berlalu tanpa dijadikan narasi kampanye yang substantif, komprehensif, sekaligus dipenuhi gagasan inspiratif berupa program dan kebijakan dalam membangun persatuan atau semangat kepeloporan warga bangsa minimal untuk lima tahun ke depan.

Gambar terutama film punya kemampuan yang lebih baik dan jauh lebih cepat, ketimbang bacaan untuk membuat orang memahami pesan-pesan tertentu," sebut Hitler dalam Mein Kampf. Adolf Hitler dan menteri propagandanya, Joseph Goebbels, meyakini bahwa film bisa menjadi alat propaganda untuk mengiringi opini publik.

Dua film nasional belakangan ini tengah ramai diperdebatkan di media massa dan media sosial. Yang pertama berjudul *A Man Called Ahok* karya sutradara Putrama Tuta, dan yang kedua film Hanum & Rangga karya Benni Setiawan.

A Man Called Ahok berdasarkan judul buku yang sama, mengangkat sebagian kisah kehidupan Basuki Tjahjaja Purnama atau Ahok. Sementara *Hanum & Rangga Faith and The City* yang diadaptasi dari novel karya Hanum Rais mengisahkan pengalaman penulis ketika tinggal di luar negeri.

Dalam dunia politik, Ahok dan Hanum Rais tidak pernah berhadapan secara langsung *face to face*. Selama ini yang menjadi lawan politik Ahok sampai ia masuk penjara adalah Amien Rais, ayah dari Hanum Rais. Mantan jurnalis yang berprofesi sebagai dokter gigi dan penulis ini juga mengikuti jejak ayahnya di dunia politik. Saat ini Hanum Rais menjadi caleg DPRD DIY untuk Pileg 2019. Nama Hanum Rais mencuat setelah video dramatisasi simpati dalam kasus hoaks Raina Sanurpa beredar.

Perseteruan antara kubu Ahok yang disebut "Ahoker" dengan kubu klan Amien Rais berlanjut dalam dunia film. Kedua film ini bukanlah film tentang politik, tapi lebih kepada film biopik yang berkisah sepenggal riwayat hidup para tokohnya.

gikan produser ke penonton. Cuitan ini dibalas kubu Ahok dengan postingan "katebeletje" surat permintaan dari Hanum Rais agar kader partai pendukung dan ormanya untuk nonton bareng filmnya.

Polarisasi Masyarakat
Sutradara film *Joko Anwar* geram film *A Man Called Ahok* dan *Hanum & Rangga* jadi ajang bully politik. Joko Anwar di Twitter (12/11/2018) menulis, "Satu film dibuat oleh puluhan, bahkan ratusan orang yang punya pandangan politik beda, atau ngak peduli sama politik seperti kamu. Memalukan."

Perdebatan sengit di medsos tentang dua film yang merambah ke masalah dunia politik, mungkin baru kali ini terjadi. Perdebatan di ranah publik itu menjadi cerminan polarisasi atau keterbelahan kubu di masyarakat yang selama ini sudah ada. Polarisasi di tengah masyarakat sebetulnya telah terjadi sejak Pilpres 2014 silam, dan berlanjut makin memanas ketika Pilkada DKI 2017. Polarisasi semakin mengguncang betepatan dengan booming pengung medsos di Indonesia. Kedua kubu mengembangkan narasi atau lebih tepatnya saling mengejek dengan sebutan "cehbang dan kampret". Cehbang vs kampret ini selalu bertikai di medsos dalam hal apa pun.

Polarisasi di masyarakat juga dibentuk dari pemberitaan dan acara yang disajikan media massa terutama televisi kepada pemeluk. Beberapa stasiun TV misalnya memperkuat polarisasi itu dengan tayangan-tayangan debat yang tidak menampilkkan solusi, justru menampilkan ego, emosi dan semakin memperuncing perbedaan antara dua kubu. Hal itu pun diperparah oleh media massa partisan yang ikut memengaruhi hidup para tokohnya.

trasi, dan bebas mengecam apa saja, termasuk mengancam pemerintah. Hal itu ditambah dengan era demokrasi digital dimana kontestasi politik atau adu argumen banyak memanfaatkan jaringan medsos.

Medsos telah dijadikan alat untuk melakukan keberpihakan politik yang saling berseterangan. Saling berseterangan itu meluas menjadi pandangan yang penting harus berbeda dengan kubu lawan. Apapun dimiliki oleh lawan politik harus berbeda dengan dirinya. Apapun baju yang dipakai kubu A harus berbeda dari kubu B. Apa yang ditonton oleh lawan politik harus berbeda dengan kubunya. Bahkan soal acungan yel-yel-jari tangan pun diubah agar berbeda, karena yel-yel tersebut memang dipakai kubu lawan di pilpres sebelumnya.

Polarisasi ini sengaja dipelihara bahkan dikembangkan oleh para elit. Masyarakat sengaja dibentuk untuk perdebatan-perdebatan yang tidak substansif. Ini sebetulnya bertujuan untuk merendahnya kualitas kontestasi politik kita. Para elite telah gagal memberikan edukasi politik gagasan.

Apresiasi Film
Film atau sinematografi adalah puncak kreativitas manusia dalam memadukan banyak cabang seni dan teknologi. Seni pada dasarnya adalah upaya manusia untuk menciptakan, menikmati, dan mengapresiasi keindahan.

Penulis sebagai penikmat film merasa tidak nyaman ketika kedua film tersebut dijadikan alat untuk membuat kegaduhan. Film memang bisa dijadikan alat kampanye dan propaganda politik, tergantung tujuan pembuatannya. *A Man Called Ahok* dan *Hanum & Rangga* bukanlah film